

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, aspek budaya telah bertransformasi menjadi daya tawar dalam konstelasi hubungan internasional. Budaya menjadi aspek yang diagendakan untuk menarik minat dan menjalin hubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Bila suatu negara merasa tertarik dan terkesan dengan budaya dari negara lain, tentunya aspek kebudayaan dapat menjadi kekuatan untuk memperoleh dukungan demi mencapai kepentingan negara tersebut. Kondisi ini mendorong masuknya budaya menjadi objek yang dipromosikan melalui kegiatan diplomasi atau yang dikenal dengan diplomasi budaya.¹

Pasca reformasi China oleh Deng Xiaoping, China berambisi meningkatkan diplomasi budaya China, dimana China sangat mementingkan peran pertukaran budaya dalam hubungan luar negeri.² Ambisi tersebut dibuktikan dengan adanya aktivitas pertukaran budaya skala besar di seluruh dunia yang berdampak pada peningkatan dan ketertarikan negara-negara serta masyarakat dunia pada nilai budaya China, penggunaan bahasa China dan pembelajaran bahasa China.³ Diplomasi budaya kemudian menjadi komponen penting bagi diplomasi China secara keseluruhan dan menjadi titik pertumbuhan diplomatik baru untuk

¹ Schneider (2006) menyebut tujuan diplomasi budaya adalah untuk meningkatkan pemahaman mutual melalui pertukaran gagasan dan informasi dari ekspresi budaya. Yulius Purwadi Hermawan dan Ratih Indraswari. 2014. *Diplomasi Budaya di Kawasan Asia Tenggara*. Universitas Katolik Parahyangan, hal 4

² Yuhan Zhou. 2020. Chinese Cultural Diplomacy Towards Thailand (1990-2018): A Case Study of Confucius Institute. *International Journal of Management and Applied Science*, Vol 6, Issue 3, hal 77

³ Ibid

menciptakan lingkungan eksternal China yang menguntungkan, menunjukkan *good image* negara China, serta meningkatkan *soft power* untuk mencapai kepentingan nasional China.⁴

Reformasi sejak 1978, telah membuat ekonomi China berkembang semakin pesat, terutama ketika negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengalami krisis ekonomi pada akhir 1990-an.⁵ Dalam menerapkan kebijakan luar negeri, China menerapkan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan mengedepankan upaya-upaya persuasif tanpa kekerasan dan perang.⁶ China menyadari betapa tingginya nilai-nilai budaya dan sejarah China, sehingga Pemerintah China menetapkan kebudayaan sebagai bagian dari *soft power* China.⁷ Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran negara-negara di dunia terhadap potensi ancaman akibat kemajuan ekonomi China, mengingat perekonomian yang luar biasa disamping memberi harapan tentang perkembangan kemajuan negara, tetapi juga menimbulkan rintangan tersendiri.

Bagi masyarakat China, istilah *soft power* merupakan hal yang dianggap baru. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri maupun diplomasi China di masa lalu yang cenderung menggunakan instrumen militer dan ekonomi.⁸ Pemimpin China seperti Jiang Zemin dan Hu Jintao, mengungkapkan keprihatinan

⁴ Han Xiangyi. 2018. *The Contribution of China's Cultural Diplomacy to Thailand (2012-2017)*. Cikarang: President University

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Linda. 2010. *Meningkatnya Power China di Indonesia Melalui Soft Power (Studi Kasus: Chinese Bridge Competition)*. Jakarta: Universitas Indonesia

⁸ Rum, Ardi Riyanto. 2017. *Kebijakan Soft Diplomacy Republik Rakyat Tiongkok dalam Peningkatan Hubungan Bilateral dengan Amerika Serikat*. Makassar: Universitas Hasanuddin

mereka terhadap lemahnya peran budaya China dalam daya saing internasional.⁹

Hu Jintao sebagai Presiden China sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis mendorong agar diplomasi budaya semakin digencarkan sebagaimana pernyataan Jintao dalam kongres ke-17 Partai Komunis China tahun 2007:

“In the present era, culture has become a more and more important source of national cohesion and creativity and a factor of growing significance in the competition in overall national strength, and the Chinese people have an increasingly ardent desire for a richer cultural life. We must keep to the orientation of advanced socialist culture, bring about a new upsurge in socialist cultural development, stimulate the cultural creativity of the whole nation, and enhance culture as part of the soft power of our country to better guarantee the people's basic cultural rights and interests, enrich the cultural life in Chinese society and inspire the enthusiasm of the people for progress.”¹⁰

Di kawasan Asia Tenggara, China terlihat sangat berintensitas dengan negara Thailand disamping negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pernyataan ini didukung oleh data *China Objectives and Corresponding Priority Countries 2018* yang ditulis oleh Lin et al (2020), menempatkan Thailand sebagai negara prioritas tertinggi China, disusul dengan Myanmar dan Malaysia seperti dijelaskan pada Tabel 1.¹¹ Adapun alat ekonomi yang digunakan China meliputi perjanjian ekonomi, proyek infrastruktur, pembatasan ekonomi atau arus barang, investasi, orang (pariwisata, pelajar), sumbangan atau tekanan ekonomi pada elit politik dan bisnis.¹² Di Thailand, hubungan ekonomi China-Thailand juga terlihat dari sumber impor Thailand yang menempatkan China di posisi pertama.

⁹ Joe Tin-yau Lo dan Suyan Pan. 2014. Confucius Institutes and China's soft power: practices and paradoxes, *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, hal. 1

¹⁰ Hu Jintao's report at 17th Party Congress, <http://www.china.org.cn/english/congress/229611.htm>, diakses pada 01 Maret 2021

¹¹ Lin, et al. 2020. *Regional Responses to U.S.-China Competition in the Indo Pacific: Study Overview and Conclusions*. Santa Monica: Rand Corporation, hal 37

¹² Ibid, 41

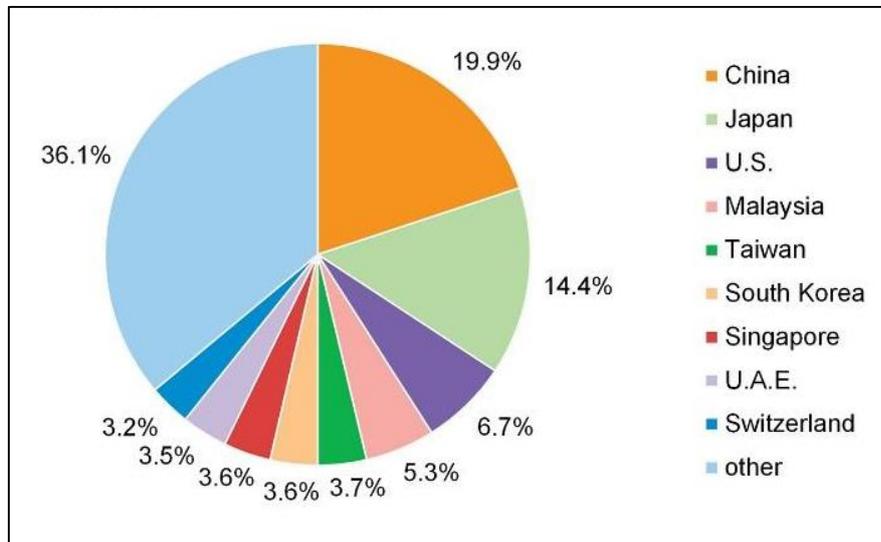
Tabel 1 Tujuan China dan Negara Prioritas Tahun 2018

	Thailand	Burma	Malaysia	Vietnam	Indonesia	Cambodia	Singapore	Laos	Philippines	Brunei
Community of shared future										
Belt and Road Initiative										
Maritime Silk Road*	√	√	√		√	√				
Silk Road Economic Belt/Economic Corridor*	√	√	√				√	√		
Digital Silk Road	√	√	√			√			√	
China-ASEAN cooperation	√	√	√	√		√		√		
Lancang-Mekong cooperation	√	√	√	√		√		√		
Sovereignty and territorial integrity										
Safeguard border security and stability*		√		√				√		
Defend SCS Claims*			√	√	√				√	√
Economic development										
Trade and investment	√	√	√	√	√		√			
Flow of maritime trade and energy*	√	√	√		√		√			
Secure and stable external environment*										
Deepen key PRC Partnerships	√	√		√		√		√		
Build other PRC partnerships			√		√		√		√	
Expand access	√	√				√				
Weaken U.S. alliances	√								√	
Weaken U.S. partnerships			√	√	√		√			
Overall total	10	9	8	7	6	6	5	5	4	1
Defense total*	7	7	7	4	5	4	4	3	4	0
Overall priority		High				Medium				Low

NOTE: Defense total refers to the total for defense-related objectives marked with an asterisk

Sumber: Lin et al. (2020)

Gambar 1 Negara Sumber Utama Impor Thailand Tahun 2017



Sumber: Britannica (t.t)

Sebagai mitra dagang terbesar kedua Thailand,¹³ China memiliki hubungan yang dekat dengan Thailand. Di pertengahan abad ke-19, Thailand telah menarik banyak imigran dari negara tetangga, khususnya China, karena ekspansi ekonomi Thailand dan pergolakan politik di tempat lain di Asia. Jumlah imigran di Thailand didominasi oleh orang China yang kemudian menjadi minoritas signifikan serta mengoperasikan perusahaan komersial di Thailand.¹⁴ Kondisi ini mempengaruhi peran penting bahasa China bagi Thailand, sehingga Pemerintah Thailand meminta dukungan dari Beijing untuk melatih lebih banyak guru bahasa Mandarin, mengirim penutur asli untuk mengajar di sekolah-sekolah Thailand, dan memberikan materi pengajaran gratis.¹⁵ Vaughn dan Morisson (2006) menyebut hasil survei tahun

¹³ Cheng Yong Lau dan Jason Wai Chow Lee. 2016. The Kra Isthmus Canal: A New Strategic Solution for China's Energy Consumption Scenario?. *Environmental Management*

¹⁴ Thailand - Chinese | Britannica

¹⁵ Johanness Dragsbaek Schmidt. 2008. China's Soft Power Diplomacy in Southeast Asia. *The Copenhagen Journal of Asian Studies*, 26, hal 30

2003, sebanyak 76 persen mengatakan Thailand dan China merupakan teman dekat.¹⁶

Untuk mendukung prinsip hidup berdampingan, Lane (2012) menjelaskan bahwa pemerintah China gencar melakukan diplomasi publik untuk mendukung ratusan pusat pembelajaran bahasa dan budaya melalui *Confucius Institute* (CI).¹⁷ CI merupakan lembaga non-profit yang didirikan tahun 2004 dan berafiliasi dengan Kementerian Pendidikan China serta diawasi oleh Hanban (Dewan Bahasa China Internasional) untuk mempromosikan pengajaran bahasa, budaya, dan aspek pengetahuan tentang China di dunia internasional dan komunitas global, dan memfasilitasi pertukaran budaya.¹⁸ Selain itu, situs Hanban (2015) menyatakan bahwa CI juga difokuskan untuk menjembatani China dengan tren ekonomi dunia sebagaimana pernyataan berikut:

*“.....many Confucius Institutes now train students in business, tourism, and trade as well as language, martial arts, and calligraphy. As China opens itself more to the world, the Confucius Institute will become a link in the chain connecting China with world economic development.”*¹⁹

Sejak tahun 2004 hingga Agustus 2011, China telah mendirikan 353 CI yang menempati sebagian besar perguruan tinggi, 473 *Confucius Classrooms* (CCs) di sekolah dasar dan menengah di 104 negara dan wilayah.²⁰ Antara tahun 2013

¹⁶ Bruce Vaughn dan Wayne M. Morisson. 2006. China-Southeast Asia Relations: Trends, Issues, and Implications for the United States. *Congressional Research Service*, hal. 25

¹⁷ J.E Lane. 2012. Higher Education and International Relations: a (very) Brief Overview of Governmental Strategies. *The Collaborative on Higher Educations and Intenational Relations Colluqium*. New York: The Nelson A. Rockefeller Institute of Government

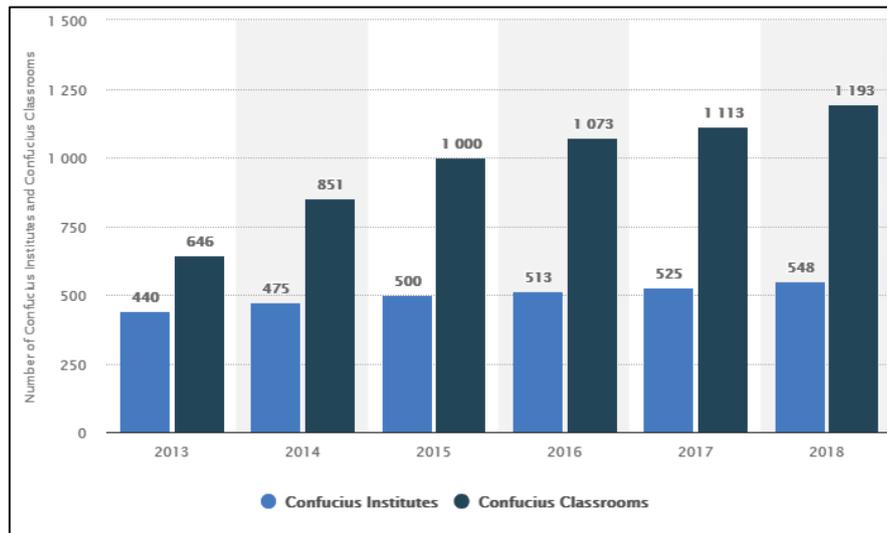
¹⁸ Jan Servaes. 2014. *Soft Power and The Chinese Dream*. Diakses daring dalam <https://waccglobal.org/soft-power-and-the-chinese-dream-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%A2%A6/> (02/03/2021)

¹⁹ Ferdiansyah, Fikri Fendy. 2019. Faktor Pendorong Perkembangan Confucius Institute di Amerika Serikat. *Jurnal Hubungan Internasional*, No.1

²⁰ Joe Tin-yau Lo dan Suyan Pan, Op. Cit, hal. 2

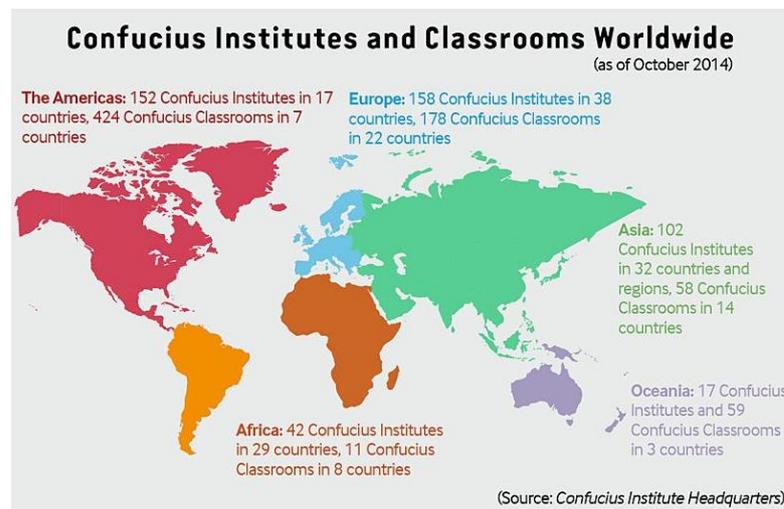
hingga 2018, jumlah CI dan CCs terus meningkat di seluruh dunia dengan total pada 2018 mencapai 548 CI dan 1.193 CCs.²¹

Gambar 2 Jumlah CI dan CCs di Seluruh Dunia Tahun 2013-2018



Sumber: Textor (2019)

Gambar 3 Peta Persebaran CI di Seluruh Dunia Tahun 2014

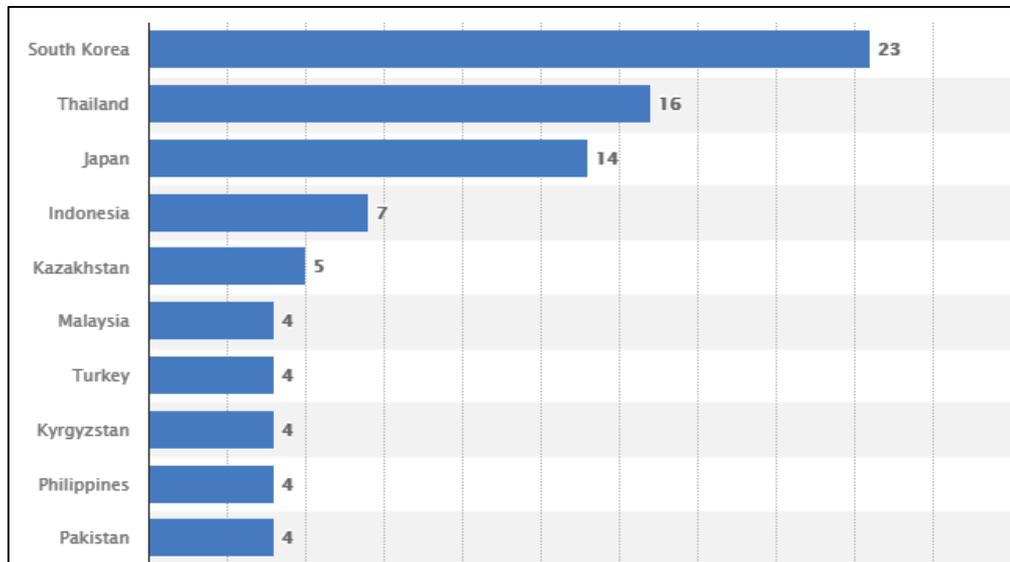


Sumber: Beijing Review (t.t)

http://www.bjreview.com/special/confucius_institutes_a_decade_of_culture.html

²¹ Textor, C. 2019. *Number of Confucius Intitute Intitute and Confucius Classrooms in the world 2013-2018*. Diakses dalam • [China: Confucius Institutes and Confucius Classrooms worldwide 2018 | Statista](#) (15/03/2021)

Gambar 4 Jumlah CI Tertinggi di 10 Negara Asia Tahun 2018



Sumber: Statista (2021)

<https://www.statista.com/statistics/879176/china-confucius-institutes-in-asian-countries/>

Berdasarkan data persebaran CI tahun 2014, dapat dilihat bahwa CI telah berdiri di lima benua, yaitu Asia, Amerika, Oceania, Eropa, dan Afrika. Di benua Asia, CI telah berdiri di 32 negara dengan jumlah terbanyak berada di Korea Selatan dan Thailand. Khusus di kawasan Asia Tenggara, Thailand merupakan negara dengan institusi CI terbanyak sekaligus negara Asia Tenggara yang paling banyak mengirim pelajar lokal ke China dengan total 21,296 pelajar pada tahun 2015.²² CI berdiri pertamakali di Thailand pada 03 Agustus 2006 di Thailand's Khon Kaen University dan total telah berkembang hingga 15 institusi pada 2017.²³ Seiring

²² Institute of International Education (IIE). 2015. *2015 Project Atlas Infographics*. Diakses dalam <https://www.iie.org/Research-and-Insights/Project-Atlas/Explore-Data/Infographics/2015-Project-Atlas-Infographics> (25/03/2021)

²³ Teerati Banterng. 2018. China's education diplomacy: An examination of collaborative public diplomacy through Confucius Institutes in Thailand. *Conference: International Association for Media and Communication Research (IAMCR)*. Oregon

banyaknya minat masyarakat Thailand pada budaya China, CI banyak aktif dalam kerjasama asosiasi akademik di tingkat lokal maupun nasional Thailand. Selain itu, Hanban sebagai lembaga pengawas CI diberikan kebebasan oleh Thailand untuk melakukan kontak komunikasi ke universitas dan kementerian terkait di Thailand, baik koneksi langsung ataupun tidak langsung, menyebabkan CI tetap eksis.²⁴ Hak istimewa yang diberikan Thailand pada Hanban merupakan salah satu bentuk komitmen negara tuan rumah dalam proses pembukaan CI.²⁵

Sebelum CI berdiri, kebijakan pemerintah Thailand yang fluktuasi menyebabkan pendidikan bahasa China mengalami pasang surut. Li (2012) dalam Wang (2019) menyebut bahwa pendidikan bahasa China mulai mengalami peningkatan ketika awal abad ke-20. Kondisi ini dipengaruhi oleh kelambanan pemerintah Thailand saat itu dalam mengimplementasikan kebijakan pembatasan pembelajaran bahasa China, sehingga terjadi peningkatan tajam di sekolah-sekolah bahasa China. Kementerian Pendidikan Thailand menyebut, pada 1920 hanya terdapat 30 sekolah China. Jumlah ini meningkat menjadi 188 pada 1928 dan 300 sekolah pada 1937.²⁶ Namun pada 1938-1944 dan 1948-1954, pendidikan bahasa China kembali mengalami tekanan di era Pemerintahan Phibun akibat kebijakan nasionalisme dan kebijakan asimilasi Thailand serta kekhawatiran tentang penyebaran komunisme dalam sekolah China.²⁷

²⁴ Shuto, Motoko. 2018. Patterns and views of China's public diplomacy in ASEAN countries: focusing on Confucius Institutes, *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 7:2, 130

²⁵ Ibid, 130

²⁶ Wang, Yujiao. 2019. Confucius Institute in Thailand: Revealing the Multi-dimensionality of China's Public Diplomacy. *Journal of the Graduate School of Asia Pacific Studies*, No. 37, hal 104

²⁷ Ibid, 104

Pada 1992, Thailand kembali membuka pengajaran bahasa asing dan secara resmi mencabut larangan terhadap pendidikan bahasa China di Thailand.²⁸ Hal ini menandai kembalinya popularitas bahasa China di Thailand. Selain itu, pasca krisis keuangan Thailand yang menyebabkan banyak perusahaan di Thailand melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), karyawan yang memiliki kemampuan bahasa China terselamatkan karena bahasa China merupakan bahasa penting dalam hubungan perdagangan bilateral China-Thailand.²⁹ Semakin pentingnya bahasa China bagi Thailand mendorong Perdana Menteri Thaksin melakukan pendekatan ke China pada 2001 dan ditanggapi oleh Hanban dengan mengirim relawan guru ke Thailand pada 2003. Kantor Hanban di Thailand menyebut pada tahun 2003 hingga 2018, China telah mengirim lebih dari 10.000 guru lokal China ke lebih dari 1000 sekolah dan universitas di Thailand, sehingga Thailand menjadi negara penerima sukarelawan China terbesar di dunia.³⁰ Selain itu, Thailand juga menjadi satu dari empat negara ASEAN, yakni Singapura, Laos, Kamboja) yang menjadi Pusat Kebudayaan China.³¹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dibuat penulis, peneliti mencoba untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana praktik diplomasi budaya China melalui *Confucius Institute* (CI) di Thailand tahun 2006-2018?”

²⁸ Ibid, 105

²⁹ Manomaiviboon, Prapi. 2004. Chinese Language Teaching in Thailand. *MANUSYA: Journal of Humanities*, Issue No. 7, hal 15

³⁰ Wang, Op. Cit, hal 105

³¹ Shuto, Op. Cit, hal 131

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu) dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik diplomasi budaya China di Thailand melalui *Confucius Institute* (CI) tahun 2006-2018. Peneliti berupaya menjelaskan relasi CI dengan pemerintah China dan bagaimana institusi pendidikan tersebut dilibatkan dalam proses diplomasi budaya ke Thailand. Dalam hal ini, peneliti menjelaskan korelasi dan konsiderasi antara kebijakan China dalam melakukan diplomasi budaya di era Hu Jintao dan Xin Jinping dalam intensi China untuk menyebarkan, mengenalkan, dan mempromosikan nilai-nilai budaya China di dunia internasional, khususnya Thailand.

Pembahasan dalam penelitian ini memuat bentuk-bentuk diplomasi budaya yang dilakukan China di era Hu Jintao dan Xin Jinping melalui *Confucius Institute* (CI) sejak awal didirikan pada tahun 2006 di Thailand hingga tahun 2018 dimana China memprioritaskan Thailand sebagai sasaran utama dalam agenda politik di Asia Tenggara. Peneliti juga menimbang dan memperhatikan kedekatan geografis dan aspek historis dalam hubungan China dan Thailand. Selain itu, pembahasan juga memuat kesepakatan kerjasama apa saja yang muncul dari upaya diplomasi budaya China ke Thailand pada periode 2006-2018. Diharapkan, penelitian ini dapat memberi pengetahuan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi akademisi dan praktisi mengenai diplomasi dalam hubungan internasional, khususnya terkait diplomasi budaya China ke Thailand.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori dan Konseptual

1.4.1.1 Diplomasi Budaya

Diplomasi budaya atau *cultural diplomacy* merupakan bagian dari diplomasi publik yang dikategorikan Gilboa (2008) sebagai upaya membangun intensi hubungan antar negara dalam jangka panjang.³² Haigh (2001) menyebut diplomasi budaya sebagai tindakan yang berakar pada hubungan budaya dan mendefinisikannya sebagai usaha negara dalam lingkup hubungan budaya internasional.³³ Milton C. Cummings (2003) mendefinisikan diplomasi budaya sebagai pertukaran ide, informasi, seni dan aspek budaya di antara bangsa dan rakyat untuk menumbuhkan *mutual understanding*.³⁴ John Brown (2009) menambahkan bahwa diplomasi budaya merupakan alat kebijakan luar negeri untuk menciptakan *mutual understanding* dengan harga yang lebih murah.³⁵ Sementara itu, Aguilar (1996) menyebut diplomasi budaya sebagai usaha pemerintah dalam menampilkan negaranya kepada masyarakat negara lain untuk membantu mencapai tujuan politik luar negeri melalui artefak budaya, seperti melalui kegiatan pameran

³² Falk Hartig. 2016. *Chinese Public Diplomacy: The rise of the Confucius Institute*. New York: Routledge, hal. 41. Lihat juga Gayle McPherson et al. (2017). *Arts, Cultural Relations and Soft Power Developing an Evidence Base*. University Of The West of Sotland (UWS) and British Council, hal. 12. Gilboa (2008) dalam kerangka analisis diplomasi publik membagi tiga intensi hubungan diplomasi publik, yaitu jangka pendek, menengah dan jangka panjang dengan memasukkan diplomasi budaya sebagai instrumen diplomasi publik untuk hubungan jangka panjang. Gilboa, Eytan. 2008. Searching for Theory of Public Diplomacy. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616: 55, hal 73

³³ A Haigh. (2001), Co to jest dyplomacja kulturalna?, [dalam] Lewandowski C. (ed.), Międzynarodowe stosunki kulturalne. *Wybór dokumentów i literatury*, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, hal. 94-95.

³⁴ Jarmila Ptáčková et al. (eds). 2021. *Transnational Sites of China's Cultural Diplomacy*. Singapore: Palgrave Macmillan, hal. 18

³⁵ Ibid, 19

atau pengajaran bahasa.³⁶ Dalam Hartig (2016), belajar bahasa asing dapat digunakan untuk menunjukkan minat pada negara lain dan masyarakatnya melalui organisasi yang mempromosikan bahasa suatu negara, seperti *Confucius Institutes*, *British Council*, *Goethe Institutes* yang berdampak pada *economic ripple-effects*.³⁷

Untuk menjelaskan gambaran secara umum program-program diplomasi budaya, Wyszomirski et al (2003) mengidentifikasinya sebagai berikut³⁸: 1) Pertukaran individu untuk tujuan pendidikan dan budaya, 2) Pameran dan pertunjukkan ke luar negeri, 3) Mensponsori seminar dan konferensi baik di dalam maupun luar negeri yang melibatkan peserta internasional, 4) Dukungan untuk program dan institusi studi bahasa, 5) Dukungan infrastruktur berupa lembaga/pusat/forum kebudayaan di luar negeri, 6) Dukungan untuk program studi negara, 7) Kerjasama internasional dalam program dan proyek budaya, 8) Kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan produk dan jasa budaya. Menurut Schneider (2006), program-program dalam diplomasi budaya ditujukan untuk meningkatkan pemahaman antara masyarakat dan budaya yang berbeda serta membuka pintu diplomat suatu negara dengan negara tuan rumah (*host country*), bahkan dalam ketegangan konflik.³⁹ McPherson (2017) memaparkan salah satu kontribusi penting budaya terhadap diplomasi publik suatu negara adalah menampilkan keragaman pandangan dan opini, mendobrak stereotip nasional terhadap suatu negara, dan menantang persepsi yang menyatakan bahwa pandangan

³⁶ Hartig, Op. Cit, 42

³⁷ Hartig, Op. Cit, 42

³⁸ McPherson et al, Op. Cit, 15

³⁹ Cynthia P. Schneider. 2006. Cultural Diplomacy: Hard to Define, but You'd Know it If You Saw It. *The Brown Journal of World Affairs*, Vol XIII, Issue 1, hal. 196

warga suatu negara identik dengan para pemimpin politiknya.⁴⁰ Dalam upaya memaksimalkan dampak diplomasi budaya, Schneider (2006) memberikan kiat-kiat keberhasilan diplomasi budaya sebagai berikut⁴¹: 1) Diplomasi budaya beroperasi dalam dua arah, 2) Bersifat jangka panjang, 3) Diplomasi budaya hanya memfasilitasi kebijakan yang populer, 4) Diplomasi budaya membawa apa yang menarik bagi penerimanya, 5) Diplomasi budaya tidak dapat diukur secara efektif dan hanya memberi perbedaan kualitatif dalam hubungan antar bangsa dan masyarakat, 6) Diplomasi budaya yang dilakukan memenuhi kepentingan negara atau wilayah tuan rumah, 7) Diplomasi bersifat kreatif, fleksibel, dan oportunistik.

Pendapat Gilboa (2008), High (2001), Cummings (2003), Scheneider (2006), dan McPherson (2017) mengarahkan pada pemahaman bahwa diplomasi budaya merupakan alat pemerintah untuk mencapai kepentingan nasional. Keterlibatan aktor pemerintah dan lembaga-lembaga terkait budaya dalam menjalankan misi diplomasi, mengindikasikan adanya suatu proses politik yang dimainkan untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan antar negara. McPherson (2017) menekankan bahwa kepentingan nasional dalam upaya diplomasi budaya harus ditunjukkan secara jelas, karena ketika kepentingan nasional kurang dipromosikan, maka hal ini hanya menjadi ranah hubungan budaya, bukan diplomasi.⁴² Menurut Villanueva (2007) ada tiga alasan yang melatarbelakangi dilakukannya diplomasi budaya kontemporer, yaitu: 1) Sebagai

⁴⁰ McPherson et al., Op. Cit, 8

⁴¹ Cynthia P. Schneider. 2006. Cultural Diplomacy: Hard to Define, but You'd Know it If You Saw It. *The Brown Journal of World Affairs*, Vol XIII, Issue 1, hal. 196

⁴² Ibid, hal. 13

reflektif nilai budaya, 2) Sebagai upaya membentuk *nation branding* yang berorientasi pada penggunaan budaya internasional sebagai sumber *territorial branding*, 3) Bentuk *soft power*.⁴³ Ketiga alasan Villanueva (2007) menandakan, diplomasi budaya dapat menjadi dasar bagi bentuk-bentuk interaksi politik dan non-politik lainnya.⁴⁴

Selanjutnya, kompleksitas kepentingan nasional dan hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya diplomasi budaya, dapat dipetakan menggunakan pemikiran Zamorano (2016) yang membagi diplomasi budaya ke dalam dua tipe, yaitu *culturalist* dan *neo-propagandist*.⁴⁵ *Culturalist* merupakan tipe reflektif yang dicirikan dengan adanya kebijakan dalam model yang terpusat atau didelegasikan dan merupakan representasi budaya teritorial yang berorientasi pada tindakan artistik, intelektual, budaya pedagogik, menggunakan skema organisasi seperti pusat budaya di luar negeri, program pertukaran, dan politik diaspora.⁴⁶ Mekanisme tipe *culturalist* bersifat horizontal yang menghasilkan keuntungan bersama yang bersifat jangka panjang seperti adanya saling pengakuan.⁴⁷ Selain itu, diplomasi budaya dalam tipe *culturalist* juga dicirikan dengan tidak adanya kontrol pemerintah pada proses kreatif dalam kegiatan difusi artistik. Ciri ini ditunjukkan dengan adanya partisipasi para aktor lokal dalam politik luar negeri untuk mewujudkan pembangunan domestik dan di luar negeri.⁴⁸

⁴³ Mariano Martin Zamorano. 2016. Reframing Cultural Diplomacy: The Instrumentalization of Culture under the Soft Power Theory, *Cultural Unbond*, Vol.8, hal 178

⁴⁴ Ptáčková et al. (eds), Loc. Cit.

⁴⁵ Zamorano, Loc. Cit

⁴⁶ Zamorano, Loc. Cit

⁴⁷ Ibid, 178

⁴⁸ Ibid, 179

Sedangkan, diplomasi budaya dalam tipe *neo-propagandist* cenderung menjadi sasaran dari instrumentalisasi politik dan ekonomi dari berbagai proses manajemen pemerintah dalam representasi budaya eksternal yang dipromosikan melalui proses administratif dan menggunakan sistem simbolik.⁴⁹ Praktik *neo-propagandist* melibatkan sektor swasta transnasional dan cenderung membatasi strategi komunikasi negara yang dilakukan oleh institusi diplomasi budaya, sehingga partisipasi sosial juga rendah. Fokus dari tipe diplomasi budaya kedua ini adalah menyebarkan konten budaya yang bersifat sepihak dengan menunjukkan pandangan positif terhadap wilayah yang bersangkutan. Cara-cara yang dilakukan dalam tipe kedua ini, seperti negosiasi industri budaya di dalam organisasi supranasional, pengembangan dan proyeksi acara besar, *cultural branding*, dan kontrol media massa sebagai alat promosi. Hasil dari tipe kedua ini hanya menciptakan representasi eksternal yang bersifat jangka pendek dan mengurangi peran diplomasi budaya sebagai alat membangun citra negara.⁵⁰

⁴⁹ Ibid, 179

⁵⁰ Ibid, 179

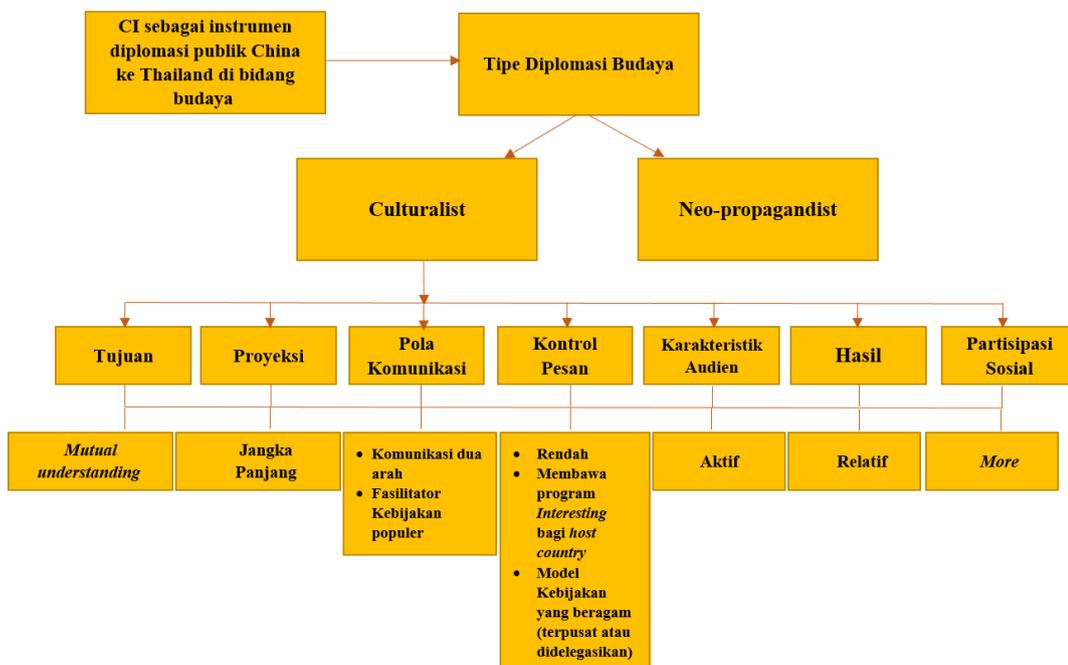
Tabel 2 Karakteristik Tipe Diplomasi Budaya Zamorano (2016)

Activites	Cultural Diplomacy	
Variables		
Ideal Types	Culturalist	Neo-propagandist
Aims	Mutual Understanding	Power/Persuasion
Projection Term	Long-term	
Pattern term communication	Two ways	One-flow messages
Control of the message	Less	More
Character of the audience	Active	Passive
Results	Relative	Specific
Social Participation	More	Less

Sumber: Zamorano (2016)

1.5 Sintesis Pemikiran

Gambar 5 Sintesis Pemikiran



Sumber: Analisis Penulis

Skema di atas menjelaskan kerangka berpikir yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian tentang bagaimana praktik Confucius Institute (CI) sebagai instrumen diplomasi budaya China di Thailand tahun 2006-2018. Penulis mengidentifikasi praktik CI sebagai instrumen diplomasi publik China di bidang budaya dengan merujuk pada pendapat Gilboa (2008) di dalam kerangka analisis diplomasi publik. Selanjutnya, penulis menentukan tipe diplomasi budaya dari CI di Thailand yang bersumber dari pendapat Zamorano (2016) yang membagi diplomasi budaya dalam dua tipe, *culturalist* dan *neo-propagandist*. Penentuan jenis diplomasi budaya dari CI di Thailand ditentukan berdasarkan indikator dari karakteristik tipe diplomasi budaya Zamorano (2016) yang terdiri dari: tujuan, proyeksi, pola komunikasi, kontrol pesan, karakteristik audien, hasil, dan partisipasi sosial. Untuk menjabarkan detail Zamorano (2016), penulis menggunakan pendapat Schneider (2006) tentang kiat-kiat mengoptimalkan dampak diplomasi budaya.

1.6 Argumen Utama

Penulis berargumen bahwa diplomasi budaya China melalui Confucius Institute (CI) di Thailand merupakan bentuk diplomasi budaya dalam tipe *culturalist*. Tipe *culturalist* dapat dilihat dari tujuan, proyeksi, pola komunikasi, kontrol pesan, karakteristik audien, hasil, dan partisipasi sosial dalam diplomasi budaya yang dilakukan China melalui CI. Dari segi tujuan dan proyeksi, pendirian CI sebagai pusat pendidikan budaya China di Thailand merupakan upaya China untuk menciptakan pemahaman bersama tentang China yang damai dan menciptakan hubungan kerjasama lebih mendalam dengan Thailand untuk proyeksi

hubungan jangka panjang. Proyeksi jangka panjang CI dibuktikan dengan bertambahnya jumlah CI di Thailand sejak awal didirikan pada 2006 hingga 2017. Selain itu, keberhasilan dari berdirinya CI di Thailand merupakan hasil komunikasi yang baik dari dua arah antara China dan Thailand serta komitmen keduanya untuk membangun kerjasama di bidang pendidikan bahasa. Dalam hal ini, kerjasama yang diprioritaskan dan difasilitasi oleh China melalui pendirian CI adalah pengajaran bahasa dan nilai-nilai budaya China.

Dari segi kontrol pesan, pemerintah China tidak secara langsung melakukan pengawasan terhadap CI, melainkan memberikan kewenangan kepada Hanban untuk menjalankan peran tersebut serta kewenangan untuk melakukan inisiasi kerjasama dengan negara tuan rumah di bidang pengajaran bahasa. Dari segi partisipasi sosial, pemerintah China mengandalkan unsur lokal daripada melibatkan sektor swasta transnasional dalam kegiatan pengajaran bahasa China. Kondisi ini memungkinkan lebih banyak partisipasi para aktor lokal dalam politik luar negeri. Hal ini terlihat dari keterlibatan para relawan lokal China untuk membantu mengajar bahasa China di Thailand.

Selain itu, pemerintah China memberikan keleluasaan bagi CI untuk melakukan strategi komunikasi dengan negara tuan rumah. Keleluasaan komunikasi CI, dibuktikan dengan adanya konektivitas CI melalui Hanban pada kementerian terkait di Thailand yang memperlancar komunikasi CI dengan universitas-universitas Thailand. Dari segi karakteristik audien, dapat dilihat dari keaktifan CI dalam mengembangkan kerjasama dengan asosiasi akademik di tingkat lokal dan nasional Thailand untuk menarik dan memperkenalkan orisinalitas

budaya China, sehingga masyarakat Thailand tertarik untuk mempelajari bahasa China. Dari segi hasil, hubungan China-Thailand dapat digambarkan relatif positif, dibuktikan dengan kemudahan yang diberikan pemerintah Thailand terhadap CI dalam melakukan komunikasi ke universitas atau memberitahukan rencana strategi ke kementerian Thailand.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam topik ini bersifat deskriptif dengan mengkaji konsep-konsep yang telah dipaparkan pada kerangka berpikir. Menurut Hossein (2015), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa dan karakteristiknya.⁵¹ Melalui tipe penelitian deskriptif, penulis hendak mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang menggambarkan gejala yang ada dan memeriksa kondisi dari praktik-praktik yang berlaku. Dalam hal ini, peneliti berusaha menjelaskan secara komprehensif tentang praktik diplomasi budaya China melalui Confucius Institute (CI) di Thailand tahun 2006-2018. Dasar pemikiran penulis menggunakan tipe penelitian ini karena topik yang dibahas penulis bukan merupakan fenomena yang bersifat eksperimental.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini mengambil rentang waktu tahun 2006 hingga 2018 dengan pembahasan yang berfokus pada hubungan bilateral di bidang pendidikan dan budaya. Batasan waktu tersebut dipilih berdasarkan tahun pertama kali CI didirikan

⁵¹ Nassaji, Hossein. 2015. Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis. *Language Teaching Research*, 19 (2), hal. 131

di Thailand di bawah era pemerintahan Presiden China Hu Jintao dan memperhatikan data *China Objectives and Corresponding Priority Countries* 2018 yang menempatkan Thailand sebagai negara prioritas tertinggi China di Asia Tenggara pada era Presiden Xin Jinping. Selain itu, pemilihan negara Thailand dalam topik diplomasi budaya China melalui CI dipilih berdasarkan data jumlah CI tertinggi di 10 negara Asia tahun 2018 yang menempatkan Thailand di posisi ke dua di bawah Korea Selatan.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif. Metode pengumpulan data kualitatif merupakan metode pengumpulan data penelitian yang didapat dari studi kasus, observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur dengan memperhatikan sumber yang jelas.⁵² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui studi literatur yang merupakan bagian dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan langsung dari pihak pertama yang diambil informasinya. Data yang ada dikumpulkan melalui sumber-sumber berupa jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, berita, dan laporan dari berbagai organisasi internasional, baik tercetak maupun daring.⁵³ Selanjutnya, data-data yang telah terkumpul akan dilakukan proses analisa data.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Neuman (2003), metode analisis data kualitatif dapat digunakan

⁵² Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press

⁵³ Bakry, U.S. 2016. *Metodologi Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

jika menyertakan studi kasus maupun observasi. Teknik analisis data kualitatif bergantung pada data non-numerik atau penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi.⁵⁴ Data empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari interpretasi kata verbal yang tidak dapat dianalisis menggunakan kuantifikasi bilangan atau angka.⁵⁵ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis informasi yang diperoleh dalam bentuk kalimat hingga paragraf dari sumber literatur.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini untuk memudahkan dalam pemahaman. Tulisan akan dibagi ke dalam 4 (empat) bab pembahasan yang di dalamnya terdapat sub pembahasan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berikut adalah pembagian bab pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang pengambilan topik penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori dan konseptual, serta metodologi penelitian.

BAB II membahas tentang CI sebagai strategi diplomasi budaya China, meliputi: sejarah hubungan China dan Thailand, sejarah berdirinya CI, tujuan China melakukan diplomasi budaya ke Thailand, dan kebijakan luar negeri China di bidang budaya pada era Hu Jintao dan Xin Jinping.

⁵⁴ Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. Sage Publications

⁵⁵ S. Margono. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Karya

BAB III membahas tentang praktik Confucius Institute (CI) sebagai instrumen diplomasi publik dan diseminasi budaya China-Thailand 2006-2018, meliputi: 1) Program-program CI, 2) Analisis relasi China, Thailand, dan CI.

BAB IV merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari topik penelitian.